

Model Konseptual dan Praksis Penguatan Economi Civics Berbasis Agribisnis di Pondok Pesantren Al Ittifaq

Yoga Gandara¹ Zulkifli² Perdi Setiawan³

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,3}

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jabbal Ghafur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia²

Email: yogagandara@unsil.ac.id¹ zulkiflipkn85@gmail.com² perdisetiawan@unsil.ac.id³

Abstrak

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga agama (Islam) tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari peran pembebasan dan pemberdayaan santri, khususnya dalam bidang ekonomi, yang sejatinya adalah bagian dari integrasi dari masalah umat Islam itu sendiri. Hal demikian ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang mengakar di masyarakat yang memiliki posisi strategi dalam upaya pengembangan umat dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan mandiri. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai yang ditanamkan pesantren Al-Ittifaq kepada santrinya adalah dengan menonjolkan etos kerja, disiplin yang tinggi, dan siap untuk kerja keras. Dengan nilai kemandirian tersebut lulusan santri memiliki kualitas pengetahuan, kemampuan, sikap, dan keterampilan yang siap terjun di masyarakat dengan ilmu agama dan keterampilan agribisnisnya. Model konseptual dalam membentuk kemandirian santri dengan pembelajaran sistem AKOSA (alami, kemukakan, olah, dan aplikasikan). Praksis dalam membentuk kemandirian santri melalui pembentukan pengurus inti agribisnis, melakukan pelatihan-pelatihan praktis, membentuk Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), melakukan kerjasama/kemitraan, dan membentuk kelompok-kelompok kerja agribisnis.

Kata Kunci: Economi Civics Berbasis Agribisnis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengembangan peran pesantren dalam memberdayakan masyarakat merupakan salah satu upaya penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan karena pemerintah masih menghadapi berbagai masalah kultural dan struktural, serta pihak swasta yang cenderung masih melakukan penyimpangan untuk memperoleh keuntungan secara sepihak. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan merupakan pendekatan yang relevan untuk memperkuat peran masyarakat (*civil society*). Pemberdayaan sangat mementingkan partisipasi aktif masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan yang mereka butuhkan. Dalam pemberdayaan ini, pemerintah daerah dituntut mampu mendayagunakan berbagai potensi, kekuatan dan partisipasi di masyarakatnya. Apalagi dengan keterbatasan sumber daya, kekuatan dan partisipasi masyarakat terutama *NGOs (Non Governmental Organizations)* sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ini. Salah satu bentuk *NGOs* yang paling potensial untuk berperan dalam memberdayakan masyarakat adalah pesantren. Pesantren yang umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan agama (Islam) telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia hingga pelosok pedesaan sangat berpotensi memberdayakan ekonomi rakyat. Kegiatan ekonomi pesantren yang pada dasarnya untuk memperoleh kemandirian dan mempermudah pelayanan (baik internal maupun ke masyarakatnya) merupakan modal besar yang potensial dikembangkan

dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Apalagi dengan kekuatannya sebagai sebuah lembaga yang mempunyai integritas kuat dan ketersediaan sumber daya yang ada didalamnya akan mampu menjadi basis pemberdayaan ekonomi rakyat secara massif dan lebih produktif.

Umiarso (2011) menyatakan bahwa istilah "pesantren" berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Pesantren mampu menjadi sebuah lembaga yang multifungsional, tidak hanya berkecukupan bagi perkembangan pendidikan Islam semata, namun juga sangat berperan bagi kemajuan pembangunan lingkungan sekitar yaitu pembangunan yang meliputi bidang sosial, ekonomi, teknologi dan ekologi, bahkan beberapa pesantren telah mampu untuk mengangkat kehidupan masyarakat sekitarnya (Ziemek, 1986). Pondok pesantren di daerah Jawa, memiliki perbedaan dari segi kurikulum maupun dari segi ilmu yang diajarkan. Namun demikian ada unsur-unsur pokok pesantren yang harus dimiliki setiap pondok pesantren. Mastuhu (1994) mengungkapkan unsur-unsur pokok sebuah pesantren, yaitu kyai, masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (atau kitab kuning), adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga agama (Islam) tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari peran pembebasan dan pemberdayaan santri, khususnya dalam bidang ekonomi, yang sejatinya adalah bagian dari integrasi dari masalah umat Islam itu sendiri. Hal demikian ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang mengakar di masyarakat yang memiliki posisi strategi dalam upaya pengembangan umat dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan mandiri. Sebagai mana yang kita sadari semua bahwa kegiatan ekonomi yang terpusat selama ini telah menghasilkan sistem ekonomi yang merugikan masyarakat kecil. Kehidupan ekonomi mereka semakin lama bukan semakin membaik melainkan terpuruk. Dengan demikian sebagai tuntutan agama (Islam) pesantren seharusnya mengambil peran untuk ikut menangani masalah ini mengapa hal demikian penting di lakukan, sebab sangat menentukan tingkat kepedulian pesantren terhadap masyarakat, khususnya santri sekitar. Disini antara santri dan masyarakat sekitarnya sebenarnya langsung maupun tidak langsung telah terjadi interaksi timbal balik yang saling mengisi (*take and give*) satu dengan yang lain. Memang tidak bisa ditampikan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dan pesantren dan masyarakat sekitar yang umumnya masyarakat kelas bawah.

Untuk terwujudnya perekonomian yang bagus disini diperlukan manusia yang siap mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk perbaikan umat yaitu manusia yang sadar akan keadaan manusianya (*human condition*), kesejahteraannya dan kemasyarakatan diperlukan pendidikan yang membentuk watak dan karakter manusia yang peduli tentang kondisi sosial. Peran pondok pesantren yang berfungsi sebagai lembaga yang peduli terhadap permasalahan sosial, kemudian dijadikan sebagai pijakan untuk menjadi pesantren sebagai agen perubahan (*agent of change*) terhadap masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Pondok pesantren juga merupakan lembaga perantara yang di harapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pembangunan masyarakat, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial ekonomi budaya. Berdasarkan beberapa keunggulan dan kelemahan pesantren di Indonesia yang telah diidentifikasi, maka penulis sangat tertarik dengan tipe pesantren yang berbasis ekonomi yaitu pesantren yang berada di Kabupaten Bandung. Hasil pra-penelitian bahwa pesantren Al-Ittifaq adalah salah satu tipikal eco-pesantren yang berwawasan keislaman, berwawasan ekonomi sekaligus juga berwawasan lingkungan. Pesantren Al-Ittifaq telah memproduksi berbagai macam jenis sayuran dengan pengelolaan pasca produksi yang meliputi penyortiran, pengelompokan, pembungkusan, pengepakan, serta pemberian merek dan label. Jenis sayuran yang sudah dihasilkan sebanyak 31 macam jenis sayuran. Hasil

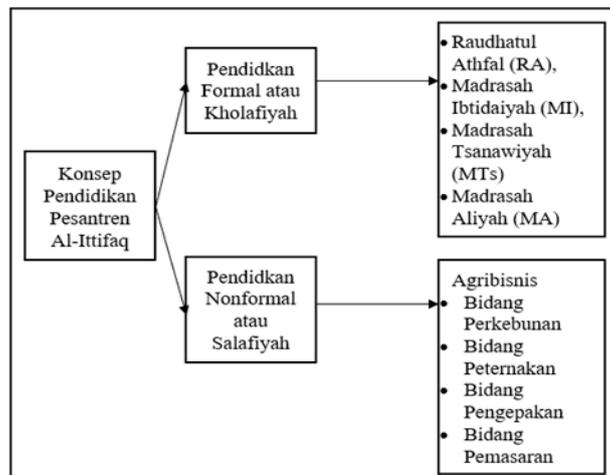
panennya berkisar 3-4 ton per harinya. Pesantren Al-Ittifaq juga sudah menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan beberapa supermarket ternama dalam memasarkan produk-produk pertaniannya, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh sebuah pesantren. Dengan aktivitas agro-ekonomi yang dilakukan di Pesantren Al-Ittifaq dapat dijadikan sebagai contoh penguatan berbasis *economic civic*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih bersifat natural, induktif, dan menemukan makna dari suatu fenomena (Suwarma, 2015). Pendekatan kualitatif jika berhadapan dengan kenyataan ganda lebih mudah disesuaikan, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Miles & Huberman (2007) mengemukakan bahwa “dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat”. Selanjutnya Creswell (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penyelidikan yang berbeda yang menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran holistik yang kompleks, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan terperinci dari informan, dan melakukan penelitian dalam suasana alami. Pernyataan ini menyiratkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada kajian interpretatif data hasil penelitian dan tidak menggunakan kuantifikasi atau perhitungan statistik. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan menggunakan metode studi kasus. Gay dkk (2009) mengemukakan penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif untuk mempelajari suatu fenomena, yang difokuskan pada unit studi atau sistem terbatas, bukan pilihan metodologi, tetapi pilihan tentang apa yang akan dipelajari, metode penelitian yang menyeluruh. Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mempelajari fenomena, terfokus atau terbatas pada satu unit penelitian, serta merupakan metode penelitian yang mencakup secara keseluruhan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa metode studi kasus digunakan untuk meneliti secara seksama dan terperinci mengenai hal-hal yang diteliti. Penelitian ini akan menghasilkan sesuatu yang khas karena merupakan penelitian yang tertuju pada suatu unit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pesantren Al-Ittifaq merupakan tipe pesantren yang tidak hanya mengembangkan nilai-nilai spiritual saja namun sebagai pesantren berbasis agribisnis. Pesantren Al-Ittifaq yang didirikan oleh KH. Mansyur pada tanggal 1 Februari 1934 sudah menjadi bagian dari masyarakat dalam mengembangkan agribisnisnya. Model konseptual penguatan *economic civic* di pesantren Al-Ittifaq terdiri dari dua tipe pesantren yaitu pesantren salafiyah dan pesantren kholafiyah. Tujuan utama dari pesantren Salafiyah utama adalah mempersiapkan lulusan santri yang tidak hanya cakap dalam bidang agama namun juga cakap dalam keterampilan atau *skills* melalui kegiatan agribisnisnya. Sedangkan jenis pesantren kholafiyah adalah mempersiapkan lulusan santri menjadi ahli riset dalam bidang agrobisnis melalui pelajaran khusus dalam bidang agrobisnis. Konsep pendidikan pesantren dapat dilihat sebagai berikut:



Pendidikan yang diterapkan pesantren Al Ittifaq adalah mengintegrasikan antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Jenjang pendidikan formal yang ada di pesantren Al- Ittifaq dimulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Pengelolanya adalah Yayasan Al Ittifaq dan bernaung di Departemen Agama. Pendidikan nonformal (pesantren) sebagai mana umumnya pendidikan salafiyah, menerapkan kurikulum sendiri dengan metoda pengajaran bandungan dan sorogan ditambah tarkiban. Jenis pendidikan ini merupakan yang pertama diterapkan di Pesantren Al Ittifaq sejak pesantren ini didirikan oleh K. H. Mansyur tahun 1934. Kurikulum yang diterapkan diarahkan untuk membimbing para santri menguasai, memahami, dan mendalami kitab-kitab Islam klasik (kuning) untuk berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan para santri. Di antara kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan kepada para santri adalah *Tijan Durori* dan *Sanusi* (Aqidah); *Safinah*, *Sulam*, *Taqriib* dan *Fathul Mu'iin* (Fiqih); *Jurumiyah*, *Imrithi*, dan *Al fiyah* (Nahwu); *Kaelani* dan *Yaqulu* (Sharaf), dan *Adzkiya*, *Minhajul 'Aabidiin*, dan *Ihya 'Ulumuddin* (Tasauf).

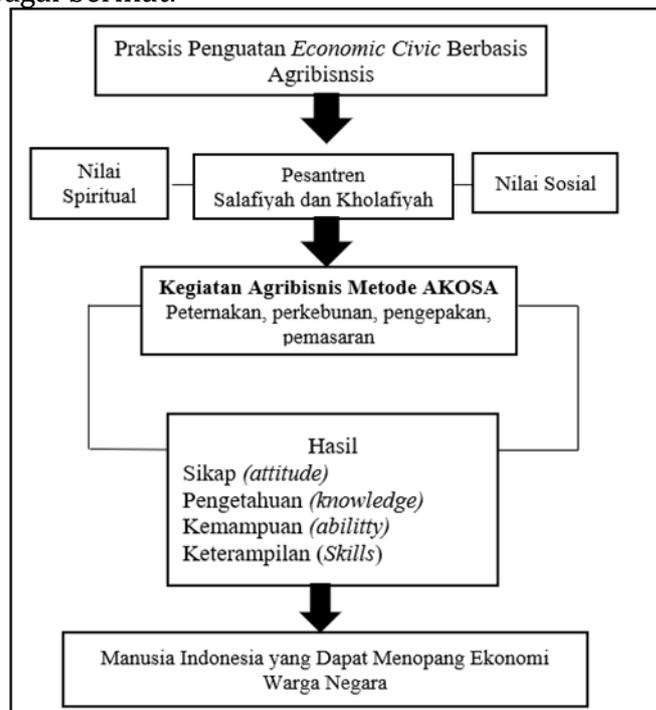
Model konseptual dalam membentuk kemandirian santri yang diterapkan oleh pesantren Al Ittifaq untuk para santrinya yaitu dengan pelatihan langsung di lapangan. Pelatihan langsung di lapangan ini diyakini lebih efektif karena para santri langsung dihadapkan pada keadaan sebenarnya. Model pelatihan ini merupakan penerapan dari proses pembelajaran metode AKOSA, yaitu : a) Alami; yaitu dengan bimbingan dari para mandornya, santri yang baru terjun di ladang atau sawah menjadi petani sebenarnya, langsung praktek misalnya mengolah tanah untuk tanaman yang akan dibudidayakannya. Pada pelatihan dengan metode ini peran mandor sangat penting, karena melalui para mandor inilah santri-santri mendapatkan pengetahuan dan keterampilan misalnya dalam hal bercocok tanam. b) Kemukakan; yaitu apabila ada hal-hal atau permasalahan yang dihadapi oleh santri, bisa langsung menanyakan kepada mandornya mengenai hal-hal yang belum dipahaminya atau terdapat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Para mandor bisa langsung menjelaskan dan mendemonstrasikan pada saat itu dan di tempat tersebut tentang hal-hal perlu diperbaiki oleh santri. c) Olah; yaitu dalam hal ini para santri tidak perlu terlalu banyak menggunakan pikiran dalam mengolah materi yang diberikan oleh para mandornya. Semua pengetahuan dan keterampilan yang diberikan para mandor dapat langsung diterapkan pada saat dan waktu itu juga. d) Simpulkan; yaitu setelah para santri mempraktekkan apa-apa yang telah diberikan oleh mandornya, mereka dapat secara langsung menyimpulkan apakah hasil yang didapat setelah mempraktekkan adalah baik atau jelek. Penilaian hasil baik atau jelek ini dapat dilakukan dikarenakan terdapat hasil dari praktek mereka sendiri. e) Aplikasikan atau terapkan; yaitu apabila dalam penilaian telah diyakini hasilnya baik, maka untuk seterusnya dapat diterapkan dalam praktek agribisnis lebih lanjut.

Metode pelatihan yang diterapkan pada pelatihan santri ini adalah metode pelatihan untuk orang dewasa. Alasan penerapan adalah dikarenakan mereka sudah tidak waktunya lagi belajar di sekolah formal (Binur, dkk, 2024). Sebelum mereka menerjuni bidang ekonomi produktif tertentu, kepada mereka ditawarkan beberapa pilihan usaha yang bisa mereka kerjakan. Selain agribisnis, mereka dapat juga memilih pertukangan, perbengkelan, dan saat ini sedang dirintis dan dikembangkan di bidang kesehatan yaitu penyembuhan *thibunabawi* dengan teknik bekam dan akupuntur. Pesantren Al Ittifaq menganggap begitu penting transfer ilmu dan keterampilan melalui pelatihan ini, karena hanya dengan pelatihanlah dapat memadukan antara teori dan praktek. Diantara keduanya harus nyambung dan saling melengkapi. Sedangkan manfaat dari kegiatan pelatihan ini, yaitu : (1) santri dapat memahami dan mendapat berbagai pengetahuan dan keterampilan disektor pertanian, khususnya usaha agribisnis, (2) memotivasi kerja dan kemauan, (3) menumbuhkan daya tarik usaha agribisnis yang akan ditekuninya, (4) mendorong dan melanggengkan minat dan kesenangan agar tumbuh terus, (5) mendapatkan imbalan baik berupa uang atau benda atau barang lainnya, dan (6) membuka akses komunikasi dengan fihak luar.

Materi pelatihan disesuaikan dengan keberadaan santri pada saat itu, apakah sedang menekuni bidang teknik budidaya, teknik *gradding*, teknik pengemasan, teknik pemasaran ataukah manajemen agribisnis. Sedangkan Instruktur pelatihan diambil dari kalangan pesantren sendiri yaitu terdiri dari para mandor/ketua kelompok dan penyuluh lapangan (PPL). Lama pelatihan disesuaikan dengan tingkat kemampuan seorang santri dapat menyerap ilmu dan keterampilan yang diberikan oleh para mandornya sebagai pembimbing. Model konseptual yang dilakukan pesantren Al-Ittifaq analog dengan karakteristik yang harus dimiliki warganegara di era demokrasi yang menurut Rozak dalam Prayitno dan Tubus (2003) meliputi kemandirian, tanggung jawab, menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi, dan berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun. Lebih lanjut Fauzan (2006), menyatakan pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan padanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diemban, yaitu: *pertama*, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*Center of Excellence*), *kedua*, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*Human Resource*), *ketiga*, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*Agent of Development*).

Pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*Social Change*) di tengah perubahan yang terjadi. Pesantren dalam keterlibatannya dengan peran, fungsi, dan perubahan yang dimaksud, memegang peranan kunci sebagai motivator, inovator, dan dinamisator masyarakat. Hubungan interaksioniskultural antara pesantren dengan masyarakat menjadikan keberadaan dan kehadiran institusi pesantren dalam perubahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Namun demikian, harus diakui belum semua potensi besar yang dimiliki pesantren tersebut terkait dengan kontribusi pesantren dalam pemecahan masalah-masalah sosial ekonomi umat. Ghazali (2002) menyatakan fungsi pondok pesantren sebagai lembaga sosial menunjukkan keterlibatan pesantren dalam menangani masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat (pemberdayaan masyarakat). Lebih lanjut Nahravi (2008), sebagai wadah pendidikan manusia yang berbasis keagamaan, pesantren berfungsi dan berperan sangatlah beragam. Satu sisi sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan; sisi lain adalah lembaga pencetak kader umat sekaligus lembaga sosial (pengembangan masyarakat). Memiliki kemandirian dapat dilihat dari visi dan misi pesantren Al-Ittifaq yaitu mempersiapkan lulusan para santri agar mandiri di masyarakat.

Tanggungjawab sebagai warga negara terlihat dalam aktivitas para santri yang sudah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan program agribisnisnya melalui koperasi mulai dari bidang peternakan, perkebunan, pengepakan, dan pemasaran. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan, nampak pada semangat hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar lingkungan pesantren sekaligus sebagai paguyuban yang mengayomi kelompok-kelompok tani yang berada di wilayah Rancabali, Kabupaten Bandung. Konsep dan praksis penguatan *economic civic* lebih diperkuat dari hasil temuan peneliti dari ketiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:



Praksis penguatan *economic civic* dalam membentuk kemandirian santri yang dikembangkan pesantren Al-Ittifaq adalah dengan basis agribisnisnya. Tujuan pesantren Al-Ittifaq dalam melaksanakan kegiatan agribisnisnya adalah memberikan suatu daya kepada santri agar santri tersebut memiliki pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skills*). Para santri dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan mengenai pengelolaan sumber daya alam dari mulai produksi, pengemasan, dan pemasaran. Sehingga ketika lulus santri tersebut dapat mandiri dalam menghadapi kebutuhan karena memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola agribisnis. Hal tersebut sejalan dengan tujuan PKn di Indonesia bahwa PKn di Indonesia ingin menjadi berdaya (*powerfull*) dalam mendorong partisipasi pada kehidupan sosial yang demokratis. Untuk membangun warganegara yang demokratis di Indonesia perlu memiliki tiga fungsi pokok yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*).

Praksis penguatan *economic civic* dalam membentuk kemandirian santri dilakukan melalui kegiatan agribisnis dengan metode AKOSA (alami, kemukakan, olah, simpulkan, dan aplikasikan). Dengan metode AKOSA akan menghasilkan lulusan santri yang memiliki sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam mengelola agribisnis. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menurut Komalasari (2008) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Adapun pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam kaitan *civic*

knowledge para santri yang ada di pesantren Al-Ittifaq dibekali pemahaman tentang bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam di daerah sekitarnya. Dalam kaitannya dengan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) menurut Komalasari (2008) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar sesuatu yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini pesantren Al-Ittifaq memberikan keterampilan untuk mengasah kemampuan para santri sesuai dengan bidang yang diminatinya. Dalam kegiatan agribisnis para santri memilih bidang agribisnis yang akan digelutinya seperti bidang produksi; peternakan, perkebunan, bidang pengepakan, dan bidang pemasaran sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Dengan keterampilan (*skills*) para santri dipersiapkan agar memiliki keterampilan dalam hal agribisnis.

Watak Kewarganegaraan (*civic disposition*), menurut Quigley, Buchanan, dan Bahmueller (dalam Komalasari, 2008) adalah “...*those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system*”, sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Watak Kewarganegaraan ini penting untuk dibina agar menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, mandiri, jujur sehingga tujuan nasional dapat dicapai. Dalam hal ini para santri diberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang sudah dijadwalkan oleh pengurus pesantren Al-Ittifaq. Kegiatan dalam penguatan *economic civic* dalam membentuk kemandirian santri di pesantren Al-Ittifaq dilakukan oleh semua santri dalam proses kegiatan mulai dari tahap produksi (bercocok tanam di kebun), pengepakan, dan pemasaran melalui wadah koperasi Al-Ittifaq. Semua kegiatan dalam bidang-bidang tersebut dilakukan seluruhnya oleh para santri dengan bimbingan dari pengurus, alumni, dan kiyai-kiyai. Sejalan dengan pendapat Wahab dan Sapriya (2011) bahwa pembelajaran *civics* selain berorientasi pada *community civics* perlu kiranya diperkenalkan cabang studi PKn lainnya seperti *economic civics* dan *vocational civics* yang tidak dapat dilepaskan antara satu dengan lainnya dari ketiga cabang *civics* tersebut karena memiliki saling keterhubungan satu dengan lainnya. Danial (2007) menjelaskan *economic civics* sebagai pengembangan konsep ilmu ekonomi yang telah cukup maju, seperti politik ekonomi atau kebijakan ekonomi. Kegiatan *economic civic* seperti yang dijelaskan oleh pakar di atas bahwa di pesantren Al-Ittifaq dapat dilihat dari proses kegiatan agribisnis yang bersifat sukarela yang merupakan wujud dari bentuk pengabdian santri di pesantren. Kontribusi para alumni juga bersifat sukarela karena dari kegiatan agribisnis tersebut selain dapat mensejahterakan kehidupan keluarga pribadi juga turut membantu dalam kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren. Santri dan alumni santri ikut berpartisipasi dalam kegiatan agribisnis dalam proses produksi, pengepakan, pemasaran. Dari kegiatan tersebut dapat kita analisis bahwa proses tersebut merupakan bentuk keterampilan (*skills*) yang diajarkan di pesantren Al-Ittifaq. Konsep *economic civic* yang diterapkan di pesantren Al-Ittifaq merupakan wujud kemampuan warganegara untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dalam mencari, mengembangkan dan menciptakan peluang usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Santri sebagai petani atau pelaksana agribisnis dalam pembentukan perilaku barunya selama belajar di pesantren Al Ittifaq mempunyai hubungan dengan pengembangan model perberdayaan santri dalam pembentukan perilaku baru tersebut yaitu berupa kompetensi agribisnis yang sedang ditekuninya di sela-sela kesibukan mempelajari ilmu agama. Notoatmodjo, S. (2010) menyebutkan bahwa perilaku itu terbentuk di dalam diri seseorang dari dua faktor utama yakni : (1) stimulus merupakan faktor dari luar diri seseorang tersebut (faktor eksternal), dan (2) respon merupakan faktor dari dalam diri orang yang bersangkutan

(faktor internal). Faktor eksternal atau stimulus adalah merupakan faktor lingkungan, baik lingkungan fisik dan non fisik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam penelitian-penelitian yang ada, faktor eksternal yang paling besar perannya dalam pembentukan perilaku manusia adalah faktor sosial dan budaya di mana seseorang itu berada. Sedangkan faktor internal yang menentukan seseorang tersebut merespon stimulus dari luar adalah perhatian, pengamatan, sikap, motivasi, fantasi, sugesti dan sebagainya.

Setiap warganegara harus memiliki kemampuan beradaptasi dan mengembangkan diri dengan lingkungannya melalui kemampuan berekonomi untuk kehidupan dirinya, lingkungannya, dan masyarakat (Gandara, 2021). Sebagai anggota masyarakat seorang warganegara juga dituntut memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan ke dalam kehidupan dan kesejahteraan warganegara. Urgensi pengembangan *economic civics* bagi warganegara dilakukan sebagai upaya menciptakan perubahan- penting dan signifikan baik lokal, nasional maupun global sesuai dengan kemajuan, perkembangan, serta perubahan ekonomi suatu bangsa. Kekuatan ini meliputi langkah nyata dan menyangkut persediaan berbagai masukan (input), serta pemukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin berdaya (Ginannjdar Kartassmita, 1996) Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era global, warga Indonesia tidak cukup hanya mampu memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara tetapi sebagai warga dunia. Hal penting yang harus dilakukan adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari pemaparan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa era globalisasi menuntut warganegara agar mempunyai pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan dalam berekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan setelah selesai sekolah.

Kegiatan agribisnis yang dilaksanakan di pesantren Al-Ittifaq dapat membantu perekonomian daerah di masa depan. Pesantren Al-Ittifaq mempunyai 7 (tujuh) bidang kegiatan yang masing-masing kegiatan tersebut ada yang bersifat mandiri dalam arti khusus digarap oleh satu bidang, dan ada juga kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Tujuh bidang tersebut antara lain: (1) Bidang pendidikan kepesantrenan, (2) Bidang Agribisnis dan Koppotren, (3) Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan, (4) Bidang Humas dan Dakwah, (5) Bidang Kesejahteraan Sosial, (6) Bidang Peranan Wanita, dan (7) Bidang Seni dan Budaya Strategi yang digunakan pesantren Al-Ittifaq dalam pengelolaan agribisnis, antara lain:

- a. Pemilihan Komoditi. Komoditi yang ditanam di lahan pertanian pondok pesantren dan sekitarnya adalah komoditi yang diminta pasar, baik pasar tradisional maupun pasar Swalayan. Dalam proses pelaksanaan pengolahan pertanian, dilaksanakan secara terpadu, hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat prioritas kebutuhan pasar.
- b. Perencanaan. Dalam upaya memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kontrak kerjasama/kemitraan antara pondok pesantren baik melalui KUD atau langsung dengan pengusaha, telah dilakukan koordinasi dengan kelompok tani lainnya yang bernaung di dalam wadah koperasi pondok pesantren.
- c. Proses Pengelolaan. Dalam pengelolaan Agribisnis tersebut, para santri dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan minat dan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus yang di miliki para santri. Secara umum pembagian tugas para santri dan Ustad tersebut adalah : (1) Pengurus Inti Organisasi Agribisnis, (2) Kesekretariatan, (3) Mandor Kebun, (4) Pengemasan, (5) Pemasaran, (6) Pekerjaan lapangan, dan (7) Pengadaan Barang.
- d. Kontrak Kerjasama dan Pemasaran. Kontrak kerjasama/kemitraan merupakan bagian yang terpenting sehingga hasil pertanian dapat langsung dipasarkan tanpa kekhawatiran tidak terjual.

Pengelolaan pendapatan yang baik dari hasil pemasaran produk yang dihasilkan di bidang pertanian dapat mensejahterakan perekonomian sekitar pedesaan. Dengan strategi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan perekonomian antara desa dan kota. Kegiatan agribisnis merupakan suatu upaya untuk memajukan usaha pertanian di pedesaan. Pelaksanaan kegiatan agribisnis dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai jalan untuk memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, selain itu kegiatan agribisnis dalam skala kecil sangat mudah diarahkan untuk bersahabat dengan lingkungan, karena dapat meminimalisir limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Saat ini pesantren Al-Ittifaq sudah melakukan mitra kerjasama dengan beberapa privat sektor dengan beberapa perusahaan swasta yang ada di wilayah swasta yaitu dengan masyarakat dan petani dan hasil usaha santri, pondok pesantren Al-Ittifaq, Instansi pemerintah, Lembaga pendidikan, Yoga Group, Toserba Banjarnegara, Kopo Mall. Pesantren Al-Ittifaq juga sebagai bagian dari *Civil Society* merupakan konsep tentang keberadaan satu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun warga negara. Penekanan ini yang membuat konsep *civil society* sangat erat terkait dengan demokrasi dan demokratisasi. *Civil society* dapat dimaknai sebagai kumpulan institusi atau organisasi di luar pemerintah dan sektor swasta, atau sebagai ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Banyak komponen *civil society* seperti organisasi, institusi masyarakat akar rumput, media massa, institusi pendidikan, asosiasi.

Aktivitas ekonomi adalah salah satu sarana untuk hidup sejahtera. Adapun hidup yang sejahtera (*hasanah*) adalah anjuran agama. Dengan demikian, upaya pencapaian kesejahteraan hidup melalui aktivitas ekonomi adalah anjuran agama. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan ungkapan *kada al-faqrū an yakūna kufraan* (kefakiran atau kemiskinan mendekati pada kekufuran), maka pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi adalah hal yang sangat penting. Hal tersebut sejalan dengan konsep *good governance* bahwa salah satu aspek suksesnya penyelenggaraan *good governance* adalah kemandirian daerah dan masyarakatnya dalam mencapai kesejahteraannya. Sejalan dengan pendapat Gunawan Sumodiningrat (1999) pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan. Untuk itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi sekarang banyak yang tidak mampu untuk melepaskan diri perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Huwaida, 2022). Strategi pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat (1999) dapat dibagi menjadi dalam tiga kelompok, *pertama*, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. *Kedua*, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. *Ketiga*, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Salah satu prinsip dalam pemberdayaan adalah penguasaan terhadap kemampuan ekonomi yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukangan dan jasa. Kemampuan dalam konteks ini menyangkut kinerja individu yang merupakan wujud kompetensi individu tersebut dapat meningkat melalui proses pembelajaran maupun terlibat langsung di lapangan, seperti kompetensi mengelola agribisnis. Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan pengelola agribisnis/petani) yang perlu ditingkatkan. Pengetahuan dan keterampilan merupakan salah satu instrumen dalam mencapai kompetensi

kerja. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren terhadap santrinya yaitu pemberdayaan melalui peningkatkan kompetensi agribisnis para santri agar nantinya para santri tersebut setelah berada kembali di lingkungan masyarakatnya dapat menjadi panutan baik dalam bidang ekonomi produktif atau sebagai kader-kader pemberdaya ekonomi, di samping peran utamanya sebagai guru yang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu agama Islam. Karena sebagai pelaksana agribisnis di pesantren adalah para santri, maka dalam menilai keberlanjutan dan keberhasilan program agribisnis di pesantren yang dikelola kelompok santri harus dilihat dari perilaku baru santri yang terbentuk dan diwujudkan berupa kompetensi agribisnisnya yang melekat pada diri para santri sebagai manusia.

KESIMPULAN

Nilai-nilai yang ditanamkan pesantren Al-Ittifaq kepada santrinya adalah dengan menonjolkan etos kerja, disiplin yang tinggi, dan siap untuk kerja keras. Dengan nilai kemandirian tersebut lulusan santri memiliki kualitas pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan sikap (attitude), dan keterampilan (skills) yang siap terjun di masyarakat dengan ilmu agama dan keterampilan agribisnisnya. Model konseptual dalam membentuk kemandirian santri dengan pembelajaran sistem AKOSA (alami, kemukakan, olah, dan aplikasikan). Praksis dalam membentuk kemandirian santri melalui pembentukan pengurus inti agribisnis, melakukan pelatihan-pelatihan praktis, membentuk Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), melakukan kerjasama/kemitraan, dan membentuk kelompok-kelompok kerja agribisnis. Pesantren Al-Ittifaq berperan sebagai sektor swasta dengan menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar Desa Alam Endah melalui koperasi Al-Ittifaq, sedangkan sebagai civil society pesantren Al-Ittifaq telah mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas seperti keagamaan, perekonomian, pendidikan, sosial, dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ittifaq, Pondok Pesantren. (1996). Anggaran Dasar Yayasan dan Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Akta Yayasan. Bandung: Pondok Pesantren Al-Ittifaq.
- Binur, R. E., Lamba, M. A., Ramandei, L., Tommi, T., Samosir, R. K., Sudiro, S., ... & Wairata, J. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan di Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Student Research Journal*, 2(5), 79-90.
- Creswell, John W. (2008). Educational Research (Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitatif Research (Third Edition). California: University of Nebraska-Lincoln.
- Danial, E. (2007). Economic Civic (Membina Warga Negara; Bersikap dan Berpartisipasi Dalam System Ekonomi Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Faozan, Akhmad. (2006). Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ibdan` | Vol. 4 | No. 1 | Jan-Jun 2006 | 88-102*
- Fauzan, Suwito (ed.). 2004. Perkembangan Pendidikan Islam Nusantara (Studi Perkembangan dari Abad 13 hingga Abad 20 M). Bandung: Angkasa.
- Gandara, Y., Zulkifli, Z., & Saefullah, F. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sebagai Implementasi Economic Civic. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2).
- Gay, L.R, dkk. (2009). Educational Research Competencies for Analysis Application (Ninth Edition). New Jersey: Upper Saddle River
- Ghazali, M. B. (2002). Pesantren berwawasan lingkungan. Prasasti.
- Ginanjar Kartassmita. (1996).Pemberdayaan untuk Rakyat. Jakarta: CIDES
- Gunawan Sumodiningrat. (1999).Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Huwaida, J. (2022). The Effectiveness of Peer Counseling in Solving Problems Adapting as a Manager of Dormitory in the Pesantren. *The Effectiveness of Peer Counseling in Solving Problems Adapting as a Manager of Dormitory in the Pesantren*, 6(2), 268-291.
- Komalasari, K. (2012). The effect of contextual learning in civic education on students' civic skills. *Educare*, 4(2).
- M Dawam Rahardjo. (1998). Pesantren dan pembaharuan. Jakarta: LP3ES
- Mastuhu. (1994). Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INS
- Miles, Matthew & Huberman, A. Michael. (2007). Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI-Press
- Nahrawi, A. (2008). Pembaharuan pendidikan pesantren. Gama Media.
- Notoatmodjo, S. (2012). Pendidikan dan perilaku kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). Pemberdayaan Masyarakat & JPS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Umiarso. (2011). Kependidikan dan Kecerdasan Spiritual. Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Wahab, A & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Ziemek, Manfred. (1986). Pesantren Dalam Perubahan Sosial. Jakarta: P3M